

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Industri & Pembangunan

Vol. 02, Ed. 03, Maret 2022

**PENYEBAB KETERGANTUNGAN INDONESIA
TERHADAP IMPOR KEDELAI** Hal. 1

**MENGUATKAN JALAN PRODUKSI
PERKEBUNAN KOPI MELALUI PISEW DAN
DANA DESA** Hal. 3

**PENTINGNYA *FACTORY SHARING* GUNA
MENINGKATKAN EKSPOR KOMODITAS KOPI
INDONESIA** Hal. 5

TANTANGAN PENURUNAN EMISI KARBON Hal. 7



PUSAT KAJIAN ANGGARAN

BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Working Professionally and Heartfully to Support
Legislative Budgetary Function

Daftar Isi

Artikel 1 Penyebab Ketergantungan Indonesia terhadap Impor Kedelai	1
Artikel 2 Memperkuat Jalan Produksi Perkebunan Kopi melalui PISEW dan Dana Desa ..	3
Artikel 3 Pentingnya <i>Factory Sharing</i> Guna Meningkatkan Ekspor Komoditas Kopi Indonesia	5
Artikel 4 Tantangan Penurunan Emisi Karbon.....	7

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Redaktur

Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Adhi Prasetyo Satrio Wibowo, S.M.

Rosalina Tineke Kusumawardhani, S.E.

Editor

Deasy Dwi Ramiayu, S.E.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska Randini, S.I.P.

Budget Issue Brief Industri dan Pembangunan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI.

PENYEBAB KETERGANTUNGAN INDONESIA TERHADAP IMPOR KEDELAI

HIGHLIGHT

- Sebesar 80 persen kedelai Indonesia berasal dari impor setiap tahunnya.
- Neraca perdagangan kedelai selalu defisit, rata-rata impor Indonesia mencapai 2 juta-2,5 juta ton per tahun.
- Indonesia dalam lima tahun terakhir hanya mampu mencukupi kebutuhan kedelai dari produksi sendiri sebesar 9,15% dari total kebutuhan.
- Laju pertumbuhan produksi dalam negeri lima tahun terakhir cenderung menurun 15,54% per tahun.
- Ketergantungan Indonesia terhadap impor disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:
 - Produktivitas kedelai lokal rendah
 - Teknologi yang diadopsi petani lokal masih tradisional
 - Preferensi pelaku usaha memiliki kebutuhan yang berbeda
 - Kualitas kedelai lokal rendah
 - Harga kedelai petani tidak dapat bersaing dengan impor

Indonesia adalah negara dengan konsumsi kedelai terbesar di dunia setelah Tiongkok. Sebagian besar pasokan kedelai dalam negeri terserap untuk kebutuhan produksi tahu dan tempe. Namun, pasokan dalam negeri tersebut hanya mampu memenuhi di bawah 20 persen kebutuhan dalam negeri. Sedangkan sisanya atau lebih dari 80 persen dipenuhi melalui impor setiap tahunnya. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 90 persen impor kedelai Indonesia tahun 2020 berasal dari Amerika Serikat (AS), sebanyak 2,24 juta ton. Jika melihat data neraca perdagangan kedelai dari tahun 2015-2019, terlihat bahwa neraca perdagangan kedelai selalu defisit setiap tahunnya, dimana rata-rata impor kedelai Indonesia mencapai 2 juta-2,5 juta ton per tahun. Dari total volume impor itu, sekitar 70 persen di antaranya dialokasikan untuk produksi tempe, 25 persen untuk produksi tahu, dan sisanya untuk produk lain. Indonesia sebenarnya pernah mengalami swasembada kedelai pada tahun 1992. Saat itu produksi kedelai dalam negeri mencapai 1,8 juta ton.

Saat ini, kebijakan impor kedelai menjadi langkah alternatif pemerintah guna mengatasi *gap* antara produksi dan konsumsi kedelai di Indonesia. Data Kementan menunjukkan bahwa lima tahun terakhir Indonesia hanya mampu mencukupi kebutuhan kedelai dari produksi sendiri sebesar 9,15% dari total kebutuhan. Situasi ini menjadi lampu merah bagi Indonesia, karena tingkat ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor yang sangat tinggi. Sedangkan, laju pertumbuhan produksi kedelai dalam negeri lima tahun terakhir cenderung terus menurun yakni rata-rata sebesar 15,54% per tahun.

Ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai disebabkan beberapa faktor yaitu, **pertama, produktivitas kedelai lokal rendah**. Berdasarkan data produktivitas kedelai dunia tahun 2014-2018, negara dengan rata-rata produktivitas kedelai tertinggi adalah di Turki (43,55 ku/ha), Italia (36,05 ku/ha), Amerika Serikat (AS) (33,40 ku/ha), dan Brasil (31,14 ku/ha). Sedangkan Indonesia tergolong rendah dan hanya berada di urutan 60 dunia, rata-rata sebesar 14,88 ku/ha atau tidak melebihi setengahnya AS sebagai produsen terbesar dunia. Data terbaru juga masih menunjukkan hal yang sama, dimana produktivitas kedelai di Indonesia sekitar 1,5-2 ton/ha dan sedangkan produktivitas di AS mencapai 4 ton/ha. Berdasarkan Survei Ubinan (BPS,2020), rata-rata produktivitas kedelai nasional 2020 sebesar 15,69 ku/ha. Provinsi dengan rata-

rata produktivitas kedelai paling tinggi di atas 20 ku/ha adalah Sulawesi Barat. Sebagian besar provinsi di Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur), Bengkulu, NTB, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tenggara memiliki rata-rata produktivitas 15,00-20,00 ku/ha. Ini artinya, Indonesia memiliki potensi untuk mengurangi impor kedelai dimana produktivitas kedelai Indonesia mampu mencapai 15,00-20,00 ku/ha. Di sisi lain, Produktivitas kedelai lokal rendah dikarenakan luas lahan tanam kedelai terus berkurang akibat alih fungsi lahan. Menurut data Kementan tahun 2019, hanya ada sekitar 285 ribu hektar luas lahan tanaman, sedangkan untuk memenuhi permintaan dalam negeri dibutuhkan setidaknya 2,5 juta hektar. Selain itu, produktivitas kedelai lokal rendah juga dipengaruhi oleh iklim. Kedelai adalah tanaman yang sebenarnya merupakan tanaman sub-tropis. Sehingga pertumbuhan di daerah tropis yang hanya memiliki dua musim seperti Indonesia menjadi tidak maksimal. Kedelai juga jenis tanaman yang membutuhkan kelembaban tanah yang cukup dan suhu yang relatif tinggi untuk pertumbuhan yang optimal. **Kedua, teknologi yang diadopsi masih bersifat tradisional.** Proses produksi kedelai lokal masih berbasis pertanian tradisional. Selain itu, dalam hal budidaya, kedelai lokal diproduksi dengan benih alami dan non-transgenik. Sedangkan proses produksi kedelai impor AS, Brasil, Argentina dan Kanada telah menggunakan teknologi dan mekanisasi. Selain itu, kedelai impor berasal dari *Genetically Modified Organism* (GMO) atau transgenik. Sedangkan, di Indonesia ada larangan produksi untuk GMO yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini yang membuat Indonesia kalah saing dari produk impor. Berdasarkan data FAO, produksi kedelai dunia selama empat dekade cenderung terus meningkat sebesar 4,19 persen per tahun. Peningkatan produktivitas dunia sangat dipengaruhi pemanfaatan teknologi modern oleh negara produsen utama yaitu AS dan Brasil. Salah satunya adalah penggunaan mesin alat dan mesin pertanian (alshintan) yang dikendalikan oleh GPS atau *autopilot* untuk mendeteksi penggunaan pupuk di Brazil pada tahun 2013. **Ketiga, Preferensi pelaku usaha memiliki kebutuhan yang berbeda.** Perajin tahu cenderung menggunakan kedelai lokal karena rasa yang dihasilkan lebih lezat dan berasal dari benih alami yang memiliki bentuk yang bulat-bulat, sedangkan perajin tempe cenderung menggunakan kedelai impor karena kedelai impor memiliki bentuk panjang-panjang dan hasilnya membuat tempe lebih empuk. Perbedaan kebutuhan pelaku usaha perlu diperhatikan oleh pemerintah, mengingat produksi yang dihasilkan dari benih alami lebih banyak digunakan perajin tahu. **Keempat, kualitas kedelai rendah.** kedelai impor sudah memiliki standardisasi mulai dari bentuk, besar, warna yang seragam. Sementara kualitas kedelai lokal tidak terstandisasi dengan baik. Kedelai nasional sulit terserap karena tidak mampu bersaing dengan kedelai impor yang berkualitas baik. **Kelima, harga kedelai petani yang tidak dapat bersaing dengan harga kedelai impor.** Harga kedelai impor jauh lebih murah dibandingkan harga kedelai lokal. Kedelai AS dan Brasil harganya Rp5.000 per kilogram, sedangkan harga kedelai lokal mencapai Rp8.500 per kilogram. Biaya produksi yang tinggi menyebabkan petani lokal hanya mendapatkan keuntungan yang sedikit.

Rekomendasi

Terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah guna meningkatkan produktivitas keledai agar mampu mengurangi ketergantungan impor kedelai secara bertahap. **Pertama** memberikan pembinaan yang intensif kepada petani agar produktivitas kedelai lebih meningkat. Pembinaan dapat dilakukan antara lain dengan penggunaan benih atau bibit unggul, pupuk dan sarana produksi yang tepat. Pembinaan juga dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak swasta. **Kedua**, pemerintah dapat menyiapkan lumbung kedelai dan mengoptimalkan produksi di daerah yang memiliki potensi produktivitas tinggi seperti Sulawesi Barat. **Ketiga**, pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak universitas-universitas dalam mengembangkan bibit unggul atau bibit transgenik yang dibutuhkan perajin tempe sehingga produksi kedelai yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan semua pelaku usaha. **Keempat**, pemerintah perlu mengadopsi teknologi dan mekanisasi yang digunakan negara-negara produsen kedelai di dunia. **Kelima**, perlunya menetapkan standardisasi kedelai lokal, agar kedelai lokal dapat terserap maksimal.

Komisi V

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

MENGUATKAN JALAN PRODUKSI PERKEBUNAN KOPI MELALUI PISEW DAN DANA DESA

HIGHLIGHT

- Komoditas kopi merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. Namun saat ini, produksi dan produktivitasnya relatif lambat sehingga menekan kinerja ekspor di pasar perdagangan kopi dunia.
- Salah satu penyebabnya adalah jalan produksi yang tidak memadai. Guna mengatasi hal tersebut, maka terdapat beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah dan mendapat atensi Komisi V DPR RI. Antara lain:
 - a) Program infrastruktur kerakyatan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang merupakan program KemenPUPR juga harus diarahkan dan diprioritaskan kepada pembangunan jalan produksi perkebunan kopi di wilayah-wilayah sentra utama kopi nasional.
 - b) KemendesPDTT perlu mengawasi, mendorong dan memastikan penggunaan dana desa juga diperuntukan untuk membangun jalan usaha tani perkebunan kopi bagi desa yang merupakan sentra kopi.
 - c) Mendorong kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara KemenPUPR dan KemendesPDTT dengan Kementan dan KLHK.

Komoditas kopi merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia. Hal tersebut dipertegas dengan meletakkan komoditas kopi sebagai salah satu sasaran pembangunan pemerintah periode 2020-2024, yang tercantum baik dalam RPJMN 2020-2024 maupun Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) 2020-2024. Pemerintah menargetkan peningkatan produksi komoditas kopi sebesar 1,5 persen di tahun 2024. Dengan demikian, produksi dan produktivitas komoditas kopi merupakan salah satu agenda strategis dan prioritas yang harus menjadi perhatian dalam menjalankan agenda pembangunan. Keharusan ini semakin diperkuat oleh begitu besarnya kontribusi komoditas ini terhadap kinerja ekspor Indonesia, minimal dalam sepuluh tahun terakhir. Pada 2020, nilai ekspor kopi Indonesia mencapai 821,3 juta US Dolar atau setara 0,52 persen dari total ekspor Indonesia yang mencapai 163,31 miliar US Dolar. Kontribusi komoditas ini tidak jauh berbeda dibanding tahun 2020 yang mencatatkan ekspor sebesar 8124,31 juta US Dolar atau 0,52 persen dari total ekspor Indonesia yang sebesar 157,78 miliar US Dolar.

Tidak hanya itu saja, keharusan tersebut juga didasarkan pada besarnya permintaan global dan besarnya kontribusi komoditas kopi terhadap total perdagangan dunia. Berdasarkan catatan UN *Comtrade* Database, perdagangan kopi dunia selama periode tahun 2010-2020 berkontribusi rata-rata 0,17 persen terhadap total perdagangan komoditas dunia. Bahkan cenderung meningkat, di mana *share* kontribusinya pada tahun 2010 sebesar 0,16 persen dan menjadi 0,18 persen pada tahun 2020. Namun di tengah gemilangnya kinerja komoditas kopi di pasar dunia, kontribusi kopi Indonesia mengalami kecenderungan penurunan. Hal tersebut terlihat dari kecenderungan penurunan penguasaan pasar atau *market share* Indonesia di pasar kopi dunia. Dari sisi nilai perdagangan (*trade value*), penguasaan pasar Indonesia masih mampu mencatatkan sebesar 3,40 persen di tahun 2010 dan menurun menjadi 2,68 persen di tahun 2020. Penurunan yang sama juga terjadi apabila dilihat dari total berat kopi (*netweight*) yang diekspor Indonesia. Pada tahun 2010, Indonesia masih mampu mengekspor 433,59 ribu ton atau setara 8,16 persen total kopi yang diperdagangkan di pasar dunia. Di tahun 2020 mengalami penurunan signifikan yakni hanya sebesar 379,35 ribu

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh,
S.E, M.Si.

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastru
Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi
Ramiayu. Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Robby Alexander Sirait

ton atau 3,14 persen dari total kopi perdagangan dunia. Padahal total kopi yang diperdagangkan di pasar dunia pada tahun 2020 mengalami lonjakan signifikan, yakni meningkat 127,09 persen dibanding tahun 2010. Memburuknya kinerja ekspor kopi tersebut, salah satunya tidak terlepas dari relatif lambatnya kinerja produksi dan produktivitas kopi Indonesia di tengah pasokan kopi dunia yang dikuasai oleh Brasil dan Vietnam yang mencapai hampir 54 persen total produksi dunia. Selama periode tahun 2010-2020, total produksi kopi Indonesia hanya mampu bertumbuh rata-rata 1,02 persen setiap tahunnya.

Salah satu penyebab lambatnya kinerja produksi kopi Indonesia tersebut adalah kurang memadainya jalan produksi perkebunan kopi di Indonesia. Hasil pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh Pusat Kajian Anggaran (2022) mencatat bahwa petani kopi yang berada di wilayah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bogor masih terkendala pada tidak memadainya jalan produksi dari lokasi perkebunan kopi menuju lokasi pengolahan *red beans* menjadi *green beans*. Hal ini yang menjadi salah satu kendala petani dalam meningkatkan produktivitas hasil panen. Kondisi ini juga terjadi di beberapa daerah, seperti di Kecamatan Pengalengan Kabupaten Bandung, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pesawaran, dan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang (Putri et.al, 2021; Hariance et.al, 2015; Ginting et.al, 2017; Evizal et.al, 2021; Bachtiyar & Prabawati, 2019). Kondisi jalan produksi yang tidak memadai tersebut pada akhirnya berimplikasi pada sulitnya petani kopi dalam memobilisasi sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan pada masa penanaman dan pemeliharaan. Tidak hanya itu saja, kondisi jalan produksi yang tidak memadai tersebut juga berdampak pada kesulitan para petani ketika memasuki masa panen sehingga proses panen menjadi tidak maksimal.

Guna meningkatkan kecepatan produksi dan produktivitas komoditas kopi di masa mendatang, maka pemerintah perlu mengatasi kendala jalan produksi yang tidak memadai tersebut. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah ke depannya dan mendapatkan atensi dari Komisi V DPR RI. **Pertama**, program infrastruktur kerakyatan melalui Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) yang merupakan program KemenPUPR juga harus diarahkan dan diprioritaskan kepada pembangunan jalan produksi perkebunan kopi di wilayah-wilayah sentra utama kopi nasional.

Kedua, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KemendesPDTT) perlu mengawasi, mendorong dan memastikan penggunaan dana desa juga diperuntukkan untuk membangun jalan usaha tani perkebunan kopi bagi desa yang merupakan sentra kopi. Hal ini sejalan dengan pengaturan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Ketiga, mendorong kolaborasi dan koordinasi yang kuat antara KemenPUPR dan KemendesPDTT dengan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup (KLHK). Penyediaan jalan produksi perkebunan kopi yang memadai merupakan pekerjaan yang dapat melibatkan lintas sektor atau lintas kementerian. Hal ini didasarkan pada terdapatnya beberapa kegiatan atau program di beberapa kementerian yang sebenarnya dapat menjadi saluran untuk mengatasi permasalahan jalan produksi, termasuk kewenangan yang berpotensi beririsan. Sebagai contoh adalah kegiatan jalan usaha tani melalui DAK Bidang Pertanian yang berada di bawah kewenangan Kementan. Contoh lainnya adalah lokasi perkebunan kopi yang berada di kawasan hutan negara dan program perhutanan sosial yang merupakan kewenangan KLHK. Oleh karena itu, koordinasi dan kolaborasi yang kuat antara KemenPUPR dan KemendesPDTT menjadi penting guna memastikan intervensi melalui PISEW dan/atau Dana Desa dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tidak tumpang tindih.

Komisi VI

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

PENTINGNYA *FACTORY SHARING* GUNA MENINGKATKAN EKSPOR KOMODITAS KOPI INDONESIA

HIGHLIGHT

Data dari ICO per tahun 2020, Indonesia menduduki posisi ke-4 sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia. Namun, menurut Anton Apriyantono, Ketua Umum Dekopi, ekspor kopi cukup menurun. Sedangkan permintaan dalam negeri terus meningkat. Sehingga kondisi ini mendorong petani kopi untuk meningkatkan produksi.

Untuk itu pemerintah perlu melakukan langkah sebagai berikut: **Pertama**, membangun *factory sharing* di sentra-sentra produksi utama komoditas kopi Indonesia; **Kedua**, melakukan penguatan PLUT baik itu milik Kementerian Koperasi maupun pemda guna mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani maupun pelaku UMKM kopi; **Ketiga**, memperkuat pendampingan pengurusan aspek perizinan berusaha, perizinan ekspor, sertifikasi, permodalan kepada lembaga pembiayaan formal, dan perpajakan, tata kelola pembukuan atau keuangan, produksi, promosi dan pemanfaatan teknologi dalam pemasaran.

Berdasarkan data dari *International Coffee Organization* (ICO), per tahun 2020, Indonesia menduduki posisi ke-4 sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia setelah Brazil, Kolombia, dan Vietnam. Namun, selama pandemi Covid 19 berlangsung, kondisi tersebut tidak lagi sama. Menurut Anton Apriyantono, Ketua Umum Dewan Kopi Indonesia (Dekopi), ekspor kopi cukup menurun. Sedangkan permintaan dalam negeri terus meningkat. Sehingga kondisi ini mendorong petani kopi untuk meningkatkan produksi.

Meskipun demikian, berdasarkan pengumpulan data dan informasi yang dilakukan oleh Tim dari Pusat Kajian Anggaran kepada petani kopi di Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta serta Provinsi Jawa Tengah, umumnya petani kopi saat ini belum mengusahakan pembudidayaan kopi secara profesional dikarenakan belum mempertimbangkan pasar, modal dan teknologi. Lebih lanjut, usaha tani kopi yang dijalankan masih bersifat tradisional yang dalam pengelolaannya hanya mengandalkan pengalaman yang didapat secara turun temurun sehingga dapat berpengaruh terhadap kinerja usaha tani kopi yang diusahakan. Petani juga belum memiliki pengetahuan tentang bagaimana teknik budi daya yang benar sehingga berdampak pada hasil produksi dan mutu kopi yang dihasilkan. Lebih lanjut, terdapat ceruk yang cukup besar dari harga biji kopi dari petani jual hingga ke pasar. Sementara itu, petani di Kabupaten Purwakarta juga menyampaikan pada tahun 2024 mereka akan mendapatkan panen biji kopi minimal 50 ton, akan tetapi mereka merasa kesulitan dalam hal akses pasar karena belum mengetahui jalur distribusi pemasaran.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, diperlukan kehadiran pemerintah guna menyediakan ekosistem bagi komoditas kopi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Lebih lanjut, tulisan ini akan coba mengulas desain rumah produksi bersama/*Factory Sharing* bagi Komoditas Kopi di Indonesia agar dapat meningkatkan ekspornya.

Dengan potensi komoditas kopi Indonesia yang sudah terbukti di pasar dunia, maka tidak ada salahnya bagi pemerintah menyediakan *Factory Sharing* bagi komoditas kopi Indonesia guna mengatasi kendala yang dihadapi para petani kopi dari hulu hingga hilir. Adapun untuk tahapannya dapat dilakukan sebagai berikut:

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastrri

Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi

Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Adhi Prasetyo



Pada tahap awal pendirian rumah produksi bersama, Kementerian Koperasi dan UKM beserta Kementerian Perindustrian terlebih melakukan pemetaan apakah komoditas kopi di daerah tersebut memiliki potensi untuk diekspor. Selanjutnya Kementerian Koperasi dan UKM melalui sinergitas bersama Pemerintah daerah (pemda) dan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait akan melihat potensi usaha, ketersediaan bahan baku, teknologi, sarana dan prasarana pendukung dari masing-masing klaster komoditas kopi. Setelah dilakukan pemetaan, tentunya akan diketahui bentuk dukungan apa saja yang diperlukan serta bagaimana dukungan yang dapat diberikan oleh para *stakeholder*.

Sebagai contoh, dalam hal penyediaan lahan rumah produksi bersama komoditas kopi, dukungan perizinan, fasilitasi dan pendampingan serta ketersediaan penunjang sarana dan prasarana (infrastruktur jalan, listrik, air, dsb) akan dilakukan oleh Pemda setempat. Kemudian terkait bahan baku akan mendapat dukungan dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya pada bagian teknologi dan digitalisasi akan menjadi domain Kementerian Komunikasi dan Informasi. Setelah itu pada aspek kelembagaan, para petani kopi yang berada pada klaster UKM yang dinilai siap dari aspek potensi usaha, ketersediaan bahan baku serta sarana dan prasarana akan didorong untuk bergabung membentuk koperasi. Dengan koperasi diharapkan para petani kopi dapat memiliki manajemen yang kuat dan dikelola secara profesional.

Lebih lanjut, petani kopi dan Koperasi yang memanfaatkan rumah produksi akan mendapatkan pendampingan serta difasilitasi baik dalam hal pembiayaan investasi, manajemen, digitalisasi, standardisasi produk, teknologi produksi dan pemasaran. Setelah itu produk yang dihasilkan pada rumah produksi bersama diharapkan akan terserap oleh BUMN, BUMD maupun swasta untuk kemudian dapat diekspor ke luar negeri serta memenuhi pasar domestik melalui pasar *offline* dan *marketplace* dengan difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan. Dengan demikian, adanya rumah produksi bersama para petani kopi akan mendapatkan perlindungan, kemudahan, pemberdayaan dan kemitraan.

Gambar 1. Desain Rumah Produksi Bersama Komoditas Kopi



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM

Rekomendasi

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemangku kebijakan, diantaranya **Pertama**, pemerintah dapat membangun *factory sharing* di sentra-sentra produksi utama komoditas kopi Indonesia seperti di Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Barat dan Jawa Timur. **Kedua**, selain membangun *factory sharing* pemerintah dapat melakukan penguatan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) baik itu milik Kementerian Koperasi maupun pemda guna mengatasi permasalahan yang dihadapi para petani maupun pelaku UMKM kopi. **Ketiga**, memperkuat pendampingan terkait pengurusan aspek perizinan berusaha, perizinan ekspor, sertifikasi, permodalan kepada lembaga pembiayaan formal, dan perpajakan, tata kelola pembukuan atau keuangan, produksi, promosi dan pemasaran, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka pemasaran.

Komisi VII

INDUSTRI DAN PEMBANGUNAN

TANTANGAN PENURUNAN EMISI KARBON

HIGHLIGHT

Transisi energi merupakan salah satu isu krusial yang diusung dalam presidensi G20 Indonesia. Di tahun 2060 atau lebih cepat, Indonesia telah ditargetkan akan mencapai karbon netral.

Tantangan yang dihadapi dalam menurunkan emisi karbon: pembangunan rendah karbon membutuhkan biaya yang besar, pajak karbon yang berdampak terhadap perekonomian perlu menjadi perhatian yang serius untuk itu pajak karbon jangan sampai berdampak dan menahan pemulihan ekonomi nasional khususnya terhadap sektor menengah dan kecil, pertumbuhan jumlah kendaraan di sektor transportasi sangat tinggi namun tidak diimbangi konsumsi BBM ke arah RON yang lebih tinggi, masih terbatasnya kemampuan jaringan untuk menyerap listrik dari pembangkit EBT, kurangnya ketersediaan teknologi yang ramah lingkungan.

Adapun alternatif kebijakan sebagai berikut: pemerintah perlu menggandeng sektor swasta yang berkomitmen untuk pertumbuhan hijau mengatasi kendala besarnya biaya dalam pembangunan rendah karbon, penerapan pajak karbon harus memperhatikan masyarakat kecil, mempercepat rencana *switch*, pemerintah perlu melakukan pengembangan interkoneksi transmisi dan jaringan listrik pintar, mengkombinasi teknologi elektrifikasi dengan pemanfaatan EBT.

Transisi energi merupakan salah satu isu krusial yang diusung dalam presidensi G20 Indonesia. Pada pilar transisi energi tersebut terdapat 3 isu prioritas yakni akses, teknologi dan pendanaan. Melalui urgensi 3 isu prioritas tersebut diharapkan Indonesia dapat mencapai karbon netral. Di tahun 2060 atau lebih cepat, Indonesia telah ditargetkan akan mencapai karbon netral.

Perencanaan pembangunan rendah karbon adalah *platform* baru untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi GRK dan intensitas emisi GRK, serta meminimalkan eksploitasi sumber daya alam. Dalam hal ini, intervensi kebijakan pembangunan yang memiliki manfaat untuk pengurangan emisi GRK dan intensitas emisi GRK akan diprioritaskan. Kapasitas sumber daya alam termasuk emisi GRK dan intensitas emisi GRK, tutupan lahan dan air menjadi faktor penentu dalam perumusan kebijakan dan menetapkan target pembangunan rendah karbon. Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (LCDI) yang dipelopori oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) menunjukkan bahwa menempuh jalur *Net-Zero Emissions* pada tahun 2060 atau lebih cepat dapat mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045, mengangkat kembali pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menurunkan emisi GRK dan meningkatkan kualitas udara, serta mampu membuat perekonomian Indonesia lebih kompetitif.

Energi terbarukan atau energi alternatif adalah segala jenis sumber energi yang digunakan untuk mengganti bahan bakar energi konvensional yang bisa habis dan tidak ramah lingkungan. Adanya energi alternatif ini ditujukan untuk mengurangi pemakaian energi hidrokarbon yang menyebabkan polusi dan merusak lingkungan karena emisi karbondioksida yang tinggi dan menjadi pemicu pemanasan global. Seiring berjalannya waktu, strategi Indonesia menuju *net zero emission* mulai diimplementasikan. Mulai dari pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang diprioritaskan untuk PLTS, implementasi *smart grid* dan smart meter, penggunaan kendaraan listrik, kompor listrik dan *Battery Energy Storage (BESS)*. Pemanfaatan EBT diprioritaskan untuk PLTS yang ditempuh dengan mulai menggencarkan program pemanfaatan energi surya. Terlebih lagi, didukung dengan mulai adanya hibah insentif PLTS Atap. Dengan biaya yang terjangkau, tentu akan meningkatkan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian

Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab : Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur: Robby Alexander Sirait · Rastri

Paramita · Dahiri · Adhi Prasetyo · Deasy Dwi

Ramiayu · Rosalina Tineke Kusumawardhani

Penulis: Sekar Arum Wijayanti



minat masyarakat untuk beralih menggunakan PLTS. Masyarakat pun dapat bersinergi lewat aksi nyatanya untuk mewujudkan energi bersih.

Ancaman perubahan iklim menjadi salah satu tantangan global yang dihadapi Indonesia dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam desain pemulihan ekonomi dimasukkan juga target untuk memulihkan ekonomi secara jauh berkelanjutan dengan jumlah emisi karbon yang lebih rendah. Melalui kesepakatan Paris, Indonesia merencanakan target pengurangan emisi karbon dalam *Nationally Determined Contribution* (NDC) sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Kebijakan pembangunan rendah karbon telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Tantangan yang dihadapi Indonesia untuk menurunkan emisi karbon yaitu, **pertama**, pembangunan rendah karbon butuh biaya besar. Membutuhkan kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam mobilisasi pendanaan dan harmonisasi investasi dengan tolok ukur rendah karbon. Perlu pendanaan tambahan dari swasta domestik serta luar negeri dan pendanaan campuran (*blended finance*) khususnya untuk investasi di *sustainable capital* yang akan menyokong transisi ini. **Kedua**, pajak karbon yang berdampak terhadap perekonomian perlu menjadi perhatian serius. Saat ini Indonesia sedang ingin mencapai pemulihan yang lebih cepat. Untuk itu, pajak karbon jangan sampai berdampak dan menahan pemulihan ekonomi nasional khususnya terhadap sektor menengah dan kecil. Masyarakat menengah bawah yang paling rentan terhadap kenaikan harga dan cenderung sulit untuk pulih dari krisis dibanding konsumen kalangan menengah dan atas.

Ketiga, pertumbuhan jumlah kendaraan di sektor transportasi sangat tinggi. Namun tidak diimbangi konsumsi BBM ke arah RON yang lebih tinggi. **Keempat**, masih terbatasnya kemampuan jaringan untuk menyerap listrik dari pembangkit EBT. Maka investasi lainnya diperlukan untuk meningkatkan keandalan dan fleksibilitas sistem tenaga, masalahnya bisnis EBT dinilai kurang menarik dan resiko tinggi akibatnya bank/lembaga keuangan kurang berminat memberikan pendanaan dengan tenor panjang dan bunga rendah. **Kelima**, kurangnya ketersediaan teknologi yang ramah lingkungan sesuai dengan kondisi lokal. Teknologi agar bisa mengurangi emisi di PLTU. Ada inisiatif *Carbon Capture and Storage* (CCS), secara teknologi masih mahal dan belum dapat diterapkan secara masif.

Berdasarkan tantangan di atas, maka alternatif kebijakan yang dapat diberikan antara lain, **Pertama** pemerintah perlu menggandeng sektor swasta yang berkomitmen untuk pertumbuhan hijau mengatasi kendala besarnya biaya dalam pembangunan rendah karbon. Guna meningkatkan ketertarikan dan keterlibatan swasta, maka pemerintah harus memastikan penerimaan yang didapatkan dari pajak karbon tersebut diarahkan untuk investasi pembangunan rendah karbon misalnya membiayai program-program pembangunan rendah karbon, membiayai bentuk sirkular ekonomi dan membiayai EBT. **Kedua**, penerapan pajak karbon harus mengedepankan prinsip keadilan dan keterjangkauan dengan tetap memperhatikan iklim berusaha dan masyarakat kecil. **Ketiga**, mempercepat rencana *switch*, misal cara mempercepatnya yaitu dihapuskannya BBM Pertalite/Premium, hanya akan ada bensin dengan kadar oktan (Research Octane Number/RON) di atas 91 yang dinilai lebih ramah lingkungan seperti Pertamax,

Keempat, dalam konteks strategi pengembangan EBT jangka panjang, pemerintah perlu melakukan pengembangan interkoneksi transmisi dan jaringan listrik pintar, serta mempercepat konversi pembangkit diesel menjadi EBT. **Kelima**, pemerintah seharusnya mengkombinasi antara teknologi elektrifikasi dengan pemanfaatan sumber energi terbarukan agar dapat mengurangi emisi karbon. Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi pengurangan emisi seperti CCS untuk menjadi solusi, mengingat CCS mampu meningkatkan produksi migas melalui CO₂-EOR atau EGR sekaligus mengurangi emisi GRK secara signifikan.



Budget Issue Brief
Industri & Pembangunan
Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI
Telp. 021-5715635, Fax. 021-5715635

